



BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada CV.Setia Abadi , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 CV. Setia Abadi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang N0.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yangdalam perhitungannnya masih ada kekeliruan yang dilakukan oleh bendahara sehingga terjadi selisih. Hal ini dasarkan dari hasil rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh bendahara dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa total pajak yang bayar oleh bendahara memiliki kekurangan dikarenakan perusahaan hanya dikalikan 1 (satu) kali perkalian sebesar 5% sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar.
2. CV. Setia Abadi kurang memahami Undang-Undang perpajakan khususnya PPh Pasal 21 serta harus selalumengetahui perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undanganperpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial sehingga tidak terjadi lagi kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak.
3. Perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 oleh bendahara (administrasi) perusahaan setiap bulannya.



4. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV. Setia Abadi dilakukan setiap bulan yang nantinya akan dibayarkan serempak berdasarkan kebijakan perusahaan.

SARAN

1. CV. Setia Abadi sebaiknya melaksanakan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, agar pelaksanaan pembayaran ke kantor pajak sesuai dengan perhitungannya.
2. CV. Setia Abadi harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
3. CV. Setia Abadi juga harus memperkerjakan karyawan sesuai keahlian terutama di bidang perpajakan supaya tidak lagi ada kesalahan yang dilakukan Bagian Akuntansi Keuangan perusahaan.
4. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan CV. Setia Abadi agar mengerti dan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 dapat dihindari.
5. Perusahaan perlu melakukan perencanaan dan pengecekan pajak terutama Pajak Penghasilan (PPh) 21



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

6. Sebelum dilakukan pemeriksaan fiskus sebaiknya perusahaan sudah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

. Daftar Pustaka

- Angraini, Dian, Devi Farah Azizah, Timotius Jositrianto. 2014. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (studi pada PT Sarah Ratu Samudera). Malang. Fakultas Ilmu Administrasi. Jurusan Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya. Jurnal Jurnal Ilmu Pendidikan (online), (<http://www.google scholar.co.id>), diakses 26 April 2016; 01.20.
- Hardianto, Aloysius Toufan. 2012. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan (studi pada PT Dutacipta Pakarperkasa. Skripsi. Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Ilmu Pendidikan (online), (<http://www.google scholar.co.id>), diakses 01 Maret 2016; 08.32
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta. Andi
- Musyassaroh, Etty. 2012. Perpajakan Brevet A dan B. Yogyakarta. Yustisia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta. Gramedia
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Rahma, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Pasal 17 ayat 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Tarif Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 122/PMK.010/2015 Direktur Jenderal Pajak tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta. Gramedia.